



Usaha Malsindo Trilateral Coordinated Patrol dalam Menangani Perampukan Bersenjata di Selat Malaka

Sri Magfirah Indriani Wijaya

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

The strategic location of the Strait of Malacca makes it one of the busiest straits in the world. The Malacca Strait serves as a channel for the distribution of oil and natural gas as a need for energy security and world trade commodities through the sea. But the high activity in the Strait is not balanced with security guarantees. Therefore, the cooperation of coastal countries is needed to maintain the security of the waters around the Strait of Malacca. Indonesia, Malaysia and Singapore formed cooperation to handle armed robbery in Malacca Strait in 2004 named Malsindo. The type of this research is analytic descriptive using qualitative method to apply neoliberalism theory. This research is aimed to know the reason measures to combat armed robbery cases in Malacca Strait between 2004-2013. The result of this research finds that measures taken by coastal country to combat armed robbery consists of Malacca Strait Sea Patrol (MSP) which was launched in 2004, Eyes in The Sky (EIS) which was launched in 2005 and MSP-IS in 2006.

Keywords: *armed robbery, Strait of Malacca, cooperation Malsindo, coordinated patrol*

PENDAHULUAN

Selat Malaka merupakan selat yang berada di wilayah teritori beberapa negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Selat Malaka merupakan jalur yang sering digunakan untuk lalu lintas perdagangan, maupun strategi militer terutama negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang dan India. Karena posisi Selat Malaka yang sangat strategis, Selat Malaka dikenal pula sebagai salah satu sasaran perampukan bersenjata. Selanjutnya, penelitian ini berupaya untuk menganalisa langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai negara-negara pantai sekitar Selat Malaka untuk menangani masalah perampukan bersenjata di Selat Malaka melalui *Malsindo Trilateral Coordinated Patrol*.

Fitur strategis yang dimiliki oleh Selat Malaka sehingga menjadi sangat penting bagi dunia adalah karena selat ini merupakan pintu masuk utama untuk kapal dagang dan tanker minyak yang berlayar dari Barat ke Timur maupun sebaliknya. Selat ini juga menjadi jalur distribusi minyak menuju kawasan Asia Timur yang merupakan wilayah yang diperkirakan memiliki ekonomi paling progresif di dunia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, kebutuhan energi negara-negara di Asia Timur diperkirakan meningkat pada dekade mendatang.

Atas dasar menjaga keamanan di sekitar Selat Malaka, maka pada tanggal 20 Juli 2004 di Batam diresmikan “*Malsindo Trilateral Coordinated Patrol*” yang merupakan kegiatan patroli terkoordinasi tiga negara antara Malaysia-Singapura-Indonesia. Diharapkan dengan adanya kerja sama ini dapat lebih meningkatkan hubungan kerjasama antara ketiga negara khususnya antara masing-masing angkatan laut dalam

menjaga keamanan kawasan Selat Malaka.

Dari latar belakang tersebut, muncul pertanyaan : Bagaimana usaha kerjasama *Malsindo Trilateral Coordinated Patrol* dalam menangani perampokan bersenjata di Selat Malaka dan apakah hambatan-hambatan bagi *Malsindo Trilateral Coordinated Patrol* dalam menangani perampokan bersenjata di Selat Malaka?. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan teori liberalisme. Dalam pandangan liberalisme setiap manusia diyakini akan mementingkan dirinya sendiri dalam segala hal dan paham ini menyadari akan sifat manusia tersebut, akan tetapi mereka berkeyakinan bahwa dengan sikap manusia yang menahan diri akan keegoisannya dan melakukan perundingan, kerjasama, semua masalah akan terselesaikan dengan hasil yang merata dan mendapatkan manfaat besar bagi setiap orang. Menurut Dugis (2013:56), memandang sebuah negara sebagai sifat manusia, sehingga suatu negara harus menahan diri kemudian memungkinkan untuk terlibat dalam perundingan serta kerjasama. Terbentuknya *Malsindo Trilateral Coordinated Patrol* oleh Malaysia, Indonesia, dan Singapura sesuai dengan teori liberalisme yang merupakan sikap menaruh kepercayaan dan menghindari prasangka, termasuk menghindari tindakan-tindakan kekerasan (*coercion approach*). Kerjasama trilateral tersebut berupaya menghindari perang secara terbuka, serta berupaya membangun solusi yang efektif yang proaktif, sekaligus preventif.

PEMBAHASAN

Berdasarkan catatan sejarah, kawasan Selat Malaka telah berabad-abad menjadi jalur strategis untuk kepentingan lalu lintas perdagangan dan di gunakan sebagai jaringan niaga perdagangan yang di manfaatkan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Selat Malaka yang juga berperan sebagai "*energy lifeline*" untuk negara ekonomi besar seperti China, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan karena lebih dari 80% impor energi dan ekspor melewati Selat Malaka dan transit utara melalui Laut Cina Selatan untuk mencapai tujuan mereka di negara Asia. Jepang, misalnya, yang mengimpor lebih dari 98% dari konsumsi minyak mentah, seluruhnya tergantung pada Selat Malaka, karena sebagian besar kapal yang memberikan minyak esensial dari Timur Tengah dan Asia Barat melewati perairan Selat Malaka (www.aspirasi-ndp.com).

Selat Malaka terletak antara negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang merupakan penghubung Samudera Hindia ke Laut Cina Selatan dan Samudera Pasifik. Selat Malaka pemasok rute terpendek antara Teluk Persia dan Pasar Asia. Selat Malaka menjadi kunci chokepoints di Asia dengan aliran minyak sebesar 13,6 juta barel per hari (bbl/d) perkiraan tahun 2009 (Syamsumar Dam, 2010 : 84).

Indonesia, Malaysia, dan Singapura bergantung pada Selat Malaka untuk aktivitas perdagangan dan perekonomian serta politik sehingga selat ini menjadi titik temu antara ketiga pihak tersebut. Selat Malaka secara geopolitik sangat vital sebagai jalur laut terpendek antara Samudera India dan Laut Cina Selatan atau Samudera Pasifik, yang memiliki nilai strategis tidak hanya bagi negara pantai (*littoral states*) tetapi juga bagi negara pengguna (*user states*). Namun, selama perairan tersebut dikelola dengan kebijakan yang kurang tepat dan tidak menyeluruh sehingga merugikan aktivitas perdagangan dan makin maraknya pertumbuhan angka kriminal di Selat Malaka.

Tiga negara pantai mempunyai hak untuk menetapkan regulasi-regulasi transit di Selat Malaka, termasuk keamanan dalam masuk dan keluarnya barang, manajemen lalu lintas, dan regulasi lainnya. Perjanjian seperti International regulation for Preventing Collisions at Sea dan United nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS), melindungi kedaulatan dan perizinan negara-negara pantai yang mengelilingi teritorial Selat Malaka.

Oleh karena negara pantai memiliki kewenangan dalam urusan keamanan, maka yang paling bertanggung jawab mengatasi pembajakan dan perompakan di Selat Malaka

adalah negara pantai. Dalam menanggapi keamanan Selat Malaka yang ada umumnya kerjasama pengamanan laut yang digunakan adalah patrol terkoordinasi atau patroli bersama (*Joint Patrol*). Yang menjadi menarik dalam penelitian ini adalah keputusan ketiga negara pantai untuk mengelola keamanan Selat Malaka secara trilateral baru dilakukan pada tahun 2004 dengan membentuk Malsindo Trilateral Coordinated Patrol, sedangkan catatan serangan perampokan bersenjata di Selat Malaka telah terjadi sejak tahun 1992. Sepanjang kurun waktu 1992 hingga 2003 ketiga negara pantai memilih untuk menggunakan upaya unilateral dan kerjasama bilateral dalam mengelola keamanan Selat Malaka. Bahkan di tahun 2000, laporan IMB menunjukkan angka serangan tertinggi, ketiga negara pantai masih bertahan pada upaya unilateral dan multilateralnya (Bill Tarrant, 2010).

Sebelum terbentuknya Malsindo terdapat beberapa jenis patroli terkoordinasi yang telah dilakukan oleh negara pantai, antara lain patroli terkoordinasi Malindo, Patroli Terkoordinasi Optima Malindo, Patroli Koordinasi Indonesia Singapura (Indosin) 2002-2008, dan *The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (2004)*.

Pada dasarnya kerjasama bilateral dan multilateral yang telah ada sebelum Malsindo seperti yang telah dijelaskan diatas tidak berjalan optimal disebabkan adanya kekurangan di masing-masing bentuk kerjasama. Seperti misalnya pada kerjasama Malindo (1984) dan Indosin (2002-2008), pada kedua kerjasama ini hanya melibatkan dua negara pantai yaitu Indonesia dan Malaysia pada Malindo, serta Indonesia dan Singapura pada Indosin. Padahal dalam wilayah Selat Malaka bersinggungan langsung dengan ketiga negara pantai tersebut, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sehingga apabila ada satu negara pantai yang tidak terlibat di dalam sebuah kerjasama (baik Malindo maupun Indosin) maka akan menjadi kendala bagi dua negara lainnya yang terikat kerjasama apabila pelaku kejahatan maritim berada atau terjadi di wilayah satu negara pantai yang tidak tergabung pada kerjasama tersebut disebabkan sudah memasuki wilayah kedaulatan negara tersebut. Sedangkan kerugian dari sisi negara pantai yang tidak tergabung adalah negara pantai ini akan merasa kesulitan apabila harus menangani kejahatan maritim yang terjadi di wilayah perairannya.

Malaysia, Singapura dan Indonesia sebagai negara pantai di tahun 2004 menjalin kerjasama Trilateral patrol terkoordinasi MALSINDO untuk mengamankan Selat Malaka dari perampokan bersenjata. Menggunakan konsep kepentingan nasional, kebijakan luar negeri, dan persepsi ancaman perampokan bersenjata usaha-usaha dan kerjasama. MALSINDO adalah suatu bentuk kebijakan luar negeri yang dipilih masing-masing negara pantai dengan dasar untuk melindungi kepentingan nasionalnya dari persepsi ancaman yang mencul di tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Isu perampokan bersenjata di semenanjung Selat Malaka mendorong negara pengguna untuk ikut mengamankan Selat Malaka.

Malsindo dengan sistem kerja Indonesia, Malaysia, dan Singapura melakukan patrol terkoordinasi dengan saling memfasilitasi berbagai informasi antara kapal dan *Monitoring and Action Agency (MAA)* (www.mindf.gov.sg). Malsindo mempunyai program kerja. Masing-masing program kerja memiliki tugas dalam mengamankan Selat Malaka dari kejahatan perampokan bersenjata. Tiga program kerja tersebut adalah yang pertama Eyes in The Sky (EIS), yakni merupakan patroli yang dilakukan melalui pantauan udara sehingga patroli dilakukan dengan menggunakan pesawat udara yang meneglilingi wilayah pengamanan Selat Malaka. Kedua, *Malacca Strait Sea Patrol (MSSP)* yang

diluncurkan pada 20 Juli 2004 dan dalam pelaksanaan patrolinya, negara Indonesia, Malaysia dan Singapura melakukan patroli terkoordinasi dengan saling memfasilitasi berbagi informasi. Terakhir, *MSP Intelligence Exchange Group* (MSP-IEG) dibentuk pada tahun 2006 oleh Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand sebagai salah satu upaya untuk mendukung patroli laut dan udara melalui Patroli Sistem Informasi Selat Malaka yang digunakan dengan mengoptimalkan aset udara dan laut di tempat kejadian untuk menyampaikan informasi dari insiden yang sedang berlangsung dan untuk semua pemantauan yang dilakukan setiap waktu.

Dengan dijalankannya operasi Malsindo pada tahun 2004 statistik memperlihatkan bahwa perompakan yang terjadi di kawasan Selat Malaka mulai menunjukkan penurunan yang signifikan. Hasil dari kerjasama ketiga negara pantai tersebut pada tahun 2004 menghasilkan tingkat perampokan bersenjata terus menerus turun hingga mencapai tidak lebih dari 50 insiden penyerangan. Tercatat selama kurun waktu 2004-2010 setelah dibentuknya Malsindo insiden kejahatan perampokan bersenjata menurun drastis. Dari 2004 mulai terbentuknya malsindo tercatat ada 38 insiden yang menurun menjadi 12 insiden pada tahun berikutnya. ICC melaporkan bahwa jumlah serangan telah menurun karena peningkatan patrol oleh negara-negara pantai sejak juli 2005 (www.icc-ccs.org diakses pada 11 Agustus 2016) dan terus menerus menurun pada tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 2013 IMB bahkan melaporkan ancaman perampokan laut di Selat Malaka hampir nol. Meskipun demikian, perlu dicatat masih adanya ancaman terorisme dan kejahatan laut lainnya yang perlu diwaspadai.

Keberhasilan tiga negara pantai dalam mengamankan Selat Malaka melalui patroli terkoordinasi selain dapat menurunkan angka pembajakan di perairan Selat Malaka juga membuat kesuksesan patroli terkoordinasi ini diakui oleh negara Asia Tenggara lainnya, sehingga beberapa negara Asia Tenggara ada yang ingin bergabung sebagai tim peninjau dalam patroli terkoordinasi. Contohnya adalah Thailand.

Namun, dengan berhasilnya kerjasama Malsindo yang ditandai dengan menurunnya kejahatan perampokan bersenjata di Selat Malaka bukan berarti Malsindo tidak memiliki hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan bagi Malsindo dalam menangani perampokan bersenjata di Selat Malaka antara lain pertama karena adanya perbedaan kepentingan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi pengguna selat. Contohnya seperti para pemilik kapal yang terkadang tidak mematuhi peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Padahal peraturan tersebut untuk menciptakan keselamatan pelayaran serta sebagai upaya penegakan hukum. Selain itu keterbatasan anggaran, keterbatasan personil, kebutuhan pendukung seperti kebutuhan bahan bakar kapal, tempat persinggahan kapal untuk mengisi ulang bahan bakar dan kebutuhan pangan bagi para personil yang sedang menjalankan tugas juga bisa menjadi hambatan bagi terlaksananya patroli terkoordinasi antara ketiga negara pantai Selat Malaka. Kedua adalah adanya perbedaan prioritas, negara di kawasan Selat Malaka sangat menyadari ancaman yang dihadapi dan senantiasa dituntut untuk selalu menciptakan keamanan di sepanjang perairan selat ini. Akan tetapi keterbatasan sumber daya manusia dan juga minimnya peralatan penunjang operasi akibat keterbatasan dana telah menimbulkan adanya prioritas kepentingan (Sanubari, 2005 : 69). Maksudnya adalah besar dana yang dibutuhkan untuk mengamankan jalur pelayaran Selat Malaka telah membuat masing-masing negara untuk memprioritaskan kepentingan nasionalnya masing-masing yang lebih mendesak. Keterbatasan anggaran membuat negara di sekitar Selat Malaka untuk mengedepankan kepentingan nasionalnya masing-masing yang lebih mendesak merupakan salah satu

hambatan dalam upaya kerjasama keamanan Indonesia, Malaysia, dan Singapura melalui patroli terkoordinasi untuk menciptakan jaminan keamanan di Selat Malaka. Hambatan kerjasama ketiga negara pantai lainnya yaitu pada konflik diantara negara-negara pantai contoh seperti sengketa pulau Sipadan dan Ligitan serta konflik-konflik perbatasan lainnya yang mengganggu kedaulatan masing-masing negara. Akan tetapi seiring dengan waktu berjalan, kewajiban Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk mengedepankan pengamanan di selat harus dilakukan agar menciptakan keamanan di Selat Malaka.

PENUTUP

Kerjasama Malsindo dibentuk sebagai inisiatif dari Indonesia, Malaysia dan Singapura yang terdiri dari berbagai macam kepentingan masing-masing negara dan sebagai wujud tanggung jawab ketiga negara terhadap adanya aktifitas perampukan bersenjata di Selat Malaka yang setiap tahunnya cenderung meningkat. Dalam analisis pembahasan dapat diketahui bahwa Kerjasama Malsindo dilatarbelakangi oleh kepentingan masing-masing negara anggota di Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dilihat dari kepentingan ekonomi dan pertahanan keamanan, ketiga negara memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kepentingannya di selat malaka.

Ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh keamanan di Selat Malaka dimana wilayah Selat Malaka sering menjadi tempat serangan perampukan bersenjata. Keadaan seperti ini yang membuat Indonesia melakukan pengamanan dari perampukan bersenjata di Selat Malaka, namun Indonesia mengalami kendala seperti dalam hal jumlah anggaran pertahanan dan kemampuan alutsista yang dimiliki kurang memadai.

Malaysia memiliki pandangan yang berbeda yaitu pembangunan jembatan di Selat Malaka bukan pada pengamanan perampukan bersenjata di Selat Malaka. Hal inilah yang membuat Malaysia belum menyepakati terbentuknya gabungan ketiga negara dalam Kerjasama Malsindo.

Ekonomi Singapura sangat bergantung pada keamanan jalur wilayah Selat Malaka karena hampir 90% aktivitas ekonomi Singapura melewati Selat Malaka. Serupa dengan Indonesia, Singapura juga melakukan pengamanan jalur Selat Malaka terhadap aktivitas perampukan bersenjata. Hal inilah yang membuat Singapura mulai membuka diri untuk bergabung kedalam Kerjasama Malsindo.

Perbedaan pandangan ketiga negara ini menjadi kendala yang menyebabkan belum terbentuknya Kerjasama Malsindo sehingga ketiga negara melakukan pertemuan untuk menyatukan pandangan dan tujuan yang pada akhirnya baru secara resmi terbentuk pada tahun 2004. Selain itu, peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat yang dikhawatirkan akan menyerang kapal-kapal yang melewati jalur Selat Malaka menjadi alasan yang melatarbelakangi Kerjasama Malsindo baru secara resmi terbentuk pada tahun 2004.

Usaha Malsindo Trilateral Coordinated Patrol dengan sistem kerjasama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura melakukan patroli terkoordinasi dengan saling memfasilitasi berbagai informasi antar kapal.

Kerjasama Malsindo dalam menangani segala bentuk aktifitas perampukan bersenjata yang terjadi di Selat Malaka menghasilkan beberapa upaya seperti Malacca Strait Sea Patrol (MSSP), Eyes In The Sky (EIS), MSP Intelligence Exchange Group (MSP-IEG). Upaya yang dilakukan Kerjasama Malsindo diharapkan dapat mencegah,

mengurangi dan menghilangkan tindakan perampukan bersenjata yang tidak jarang membuat nakhoda dan awak kapal meningkatkan kewaspadaan mereka apabila kapal mereka akan atau sedang melewati Selat Malaka.

Sejak dibentuknya Kerjasama Malsindo pada tahun 2004, perampukan bersenjata di Selat Malaka sampai dengan tahun 2013 cenderung menurun sehingga Kerjasama Malsindo berperan besar terhadap penurunan jumlah perampukan bersenjata di Selat Malaka sehingga kerjasama ini dapat dikatakan berhasil dilakukan di Selat Malaka. Keberhasilan kerjasama Malsindo disebabkan oleh kepatuhan dari masing-masing negara terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan keuntungan yang diperoleh negara dari tujuan yang sama yaitu menurunkan perampukan bersenjata untuk membuat Selat Malaka lebih aman.

Namun, dalam pelaksanaannya Malsindo juga menghadapi hambatan-hambatan dalam menangani perampukan bersenjata di Selat Malaka seperti adanya perbedaan kepentingan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi pengguna selat. Keterbatasan anggaran, keterbatasan personil, kebutuhan pendukung seperti kebutuhan bahan bakar kapal, tempat persinggahan kapal untuk mengisi ulang bahan bakar dan kebutuhan pangan bagi para personil yang sedang menjalankan tugas juga bisa menjadi hambatan bagi terlaksananya patroli terkoordinasi antara ketiga negara pantai Selat Malaka. Hambatan kerjasama ketiga negara pantai lainnya yaitu pada konflik diantara negara-negara pantai. Akan tetapi seiring dengan waktu berjalan, kewajiban Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk mengedepankan pengamanan di selat harus dilakukan agar menciptakan keamanan di Selat Malaka.

Referensi

Bill Tarrant, 2010. Balancing Powers in The Malacca Strait, *Global News Journal*, dalam <http://blogs.reuters.com/global/2010/03/07/balancing-powers-in-the-malacca-strait/> diakses tanggal 10 Agustus 2015

Dam Syamsumar, 2010, politik kelautan, Jakarta: Bumi Aksara

Dugis, Vinsensio. 2013. Konflik dan Resolusi Konflik. Surabaya : CSCG Publisher.

Defence Minister's of Singapore Government. 2008. *Milestones of Malacca Strait Patrols* http://www.mindf.gov.sg/imindf/press_room/official_releases/nr/2008/mar/28mar08_nr/28mar08_fs.html#.VsUGNrR97Mw diakses pada 28 Mei 2015 pukul 22.03 WIB

Ida Bagus Sanubari, "Meningkatkan Pengamanan Selat Malaka Guna Mencegah Internasionalisasi Asing Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI", kertas Karya perorangan, Jakarta; lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2005, h. 52.

Against Ship Annual Report. Dalam http://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/ICC_InternationalMaritimeBoard_Annual_Armed robbery _Report2004.pdf diakses pada 2 Juni 2014

ICC International Maritime Bureau. 2005. Armed robbery and Armed Robbery Against Ship Annual Report. Diakses http://www.le-havre.vessels-in-france.net/fichiersdoc/2005_ICC_Armed robbery _annual_report.pdf diunduh pada 23 Desember 2013

ICC International Maritime Bureau. 2006. Armed robbery and Armed Robbery Against Ship Annual Report. Diakses <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja>

&uact=8&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffin.nepia.com%2Fmodules%2Fassetlibrary%2Fz_extr diunduh 28 Oktober 2013

ICC International Maritime Bureau. 2007. Armed robbery and Armed Robbery Against Ship Annual Report. Diakses http://www.rk-marine-kiel.de/files/piraterie/imb/imb_armed_robbery_report_2007.pdf diunduh pada 14 April 2014